

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan Daerah. Perencanaan Daerah dalam bentuk Rencana Menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Kulon Progo terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja (SKPD).

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyusun rancangan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 dengan fokus pada bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2016;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 dan kelanjutan pelaksanaan Renstra SKPD terdahulu.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja SKPD sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2017

Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dievaluasi melalui analisa pencapaian kinerja dan aspek penyerapan anggaran secara lebih rinci. Capaian kinerja didasarkan pada indikator kinerja dan capaian indikator atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Indikator yang dimaksudkan meliputi kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts).

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2015 berjalan baik dan lancar. Target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang mencapai 97,71%. Tingkat penyerapan anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan penyesuaian perbedaan antara harga barang/jasa di DPA dengan harga riil pasar, sehingga pertanggungjawaban disesuaikan harga pasar. Sisa yang merupakan selisih harga di DPA dengan di pasar serta sisa lelang dikembalikan ke kas Daerah. Hal ini berarti tingkat penyerapan anggaran merupakan harga riil di pasar.

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Dinas sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 - 2015

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2015		
				2013	2014	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP	(Jumlah penduduk yg ber-KTP/Jumlah penduduk wajib KTP x 100 %)	%	98,88	97,39	100	98,28	98,28
2.	Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran	Jumlah penduduk yg memiliki akta /Jumlah penduduk x 100 %	%	63,76	66,99	64,07	65,10	101,61

2.1.1 Capaian Kinerja tahun 2015 dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

Penilaian pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD tahun 2015 dengan melakukan analisis pencapaian kinerja berdasarkan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja terhadap hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo akan diuraikan melalui evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan secara lebih rinci.

Pengukuran kinerja SKPD dilakukan melalui dua kegiatan yaitu penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja.

- a. Penetapan indikator kinerja SKPD merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan program/kegiatan/kebijakan menurut kelompok masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- bersifat spesifik dan jelas
- dapat diukur secara objektif baik kuantitatif maupun kualitatif
- dapat dicapai, penting, dan berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak
- fleksibel dan sensitif terhadap perubahan perkembangan zaman
- efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efektif, efisien dan ekonomis.

- b. Pencapaian capaian kinerja

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan program kerja, kegiatan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan tidak terlepas dari indikator proses yaitu kegiatan mengolah input menjadi output, out comes, benefits, dan impacts atau proses penyusunan kebijakan/kegiatan yang penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, menghitung nilai capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kebijakan didasarkan pada nilai kinerja kegiatan tersebut.

Hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kulon Progo

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2014)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2016)	Perkiraan Capaian SKPD s/
					Target Renja SKPD tahun (n-2) (2015)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) (2015)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7)
1									
1	10								
1	10	1	10	01	01				
1	10	1	10	01	01	01			
1	10	1	10	01	01	07			
1	10	1	10	01	01	17			
1	10	1	10	01	02				
1	10	1	10	01	02	03			

1	10	1	10	01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output (Kegiatan) : Sarana dan prasarana aparatur	793.923.370	-	124.880.000	157.800.000	126	137.368.000	295.168.000
							Outcomes (Program) : Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik								
1	10	1	10	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia								
1	10	1	10	01	05	04	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan non formal	Output (Kegiatan) : Pendidikan dan pelatihan non formal	23.000.000	-	8.000.000	8.000.000	100	15.000.000	23.000.000
							Outcomes (Program) : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SKPD								
1	10	1	10	01	05	05	Kegiatan Pengadaan Baju PDH PNS	Output (Kegiatan) : Pakaian PDH batik bagi PNS	10.300.000	-	10.300.000	9.149.000	89	-	9.149.000
							Outcomes (Program) : Terpenuhinya penggunaan PDH batik oleh PNS								
1	10	1	10	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	10	1	10	01	06	01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Output (Kegiatan) : Rencana Kerja SKPD	9.000.000	-	4.000.000	4.000.000	100	5.000.000	9.000.000
							Outcomes (Program) : Tersedianya perencanaan tahunan SKPD								
1	10	1	10	01	06	02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Output (Kegiatan) : Laporan keuangan SKPD	15.000.000	-	7.500.000	7.500.000	100	7.500.000	15.000.000
							Outcomes (Program) : Terlaporkannya kinerja keuangan								
1	10	1	10	01	07	02	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Output (Kegiatan) : Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD	17.000.000	-	8.000.000	8.000.000	100	9.000.000	17.000.000
							Outcomes (Program) : Terlaporkannya kinerja SKPD								
1	10	1	10	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan								
							Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Output (Kegiatan) : Kartu Tanda Penduduk : Kartu Keluarga : Surat Pindah Datang : Rekaman e-KTP penduduk	2.601.692.795	-	268.000.000	110.800.000	41	465.000.000	575.800.000
							Outcomes (Program) : Teterbitkannya KTP, KK dan Surat keterangan pindah datang penduduk								

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat adalah jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan Dokumen Kependudukan meliputi :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada indikator kinerja yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 – 2016. Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2015 (thn n - 2)	Tahun 2016 (thn n - 1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n +1)	Tahun 2015 (thn n -2)	Tahun 2016 (thn n - 1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n +1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %	100 %	100 %	100 %	98,28 %	98,50 %	100 %	100 %
2.	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	100 %	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	100 %	100 %	100 %	100 %	97,80 %	98,00 %	99 %	99 %
3.	Cakupan penerbitan KK	100 %	Cakupan penerbitan KK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Cakupan penerbitan Akta Kematian	70 %	Cakupan penerbitan Akta Kematian	100 %	100 %	100 %	100 %	77,37 %	85,75 %	79 %	82 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat .

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan

secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dibuat dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 dan dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 2011-2016.

Rincian kegiatan yang ada pada Renstra tersebut mengacu pada RPJMD untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi *Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Melalui Kepastian, Perlindungan dan Penegakan Hukum*.

Untuk mendukung tercapainya misi dalam RPJMD maka diperlukan program dan kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2017
KABUPATEN KULON PROGO

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Urusan Wajib					Urusan Wajib				
	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil					Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			20%	231.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			20%	
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Outcomes (Program) : Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor	12 bulan	151.000	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Outcomes (Program) : Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor	12 bulan	
2	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Honorarium petugas penatausahaa keuangan dan barang Outcomes (Program) : Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	25.500	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Honorarium petugas penatausahaa keuangan dan barang Outcomes (Program) : Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	
3	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Makanan dan minuman untuk rapat, dan biaya koordinasi dan konsultasi Outcomes (Program) : Terkoordinasikannya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD	12 bulan	55.000	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Makanan dan minuman untuk rapat, dan biaya koordinasi dan konsultasi Outcomes (Program) : Terkoordinasikannya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD	12 bulan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.412.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Sarana dan prasarana kantor Outcomes (Program) : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	23 unit	105.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Sarana dan prasarana kantor Outcomes (Program) : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	62 unit	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Sarana dan prasarana kantor Outcomes (Program) : Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	33 unit	2.307.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) : Sarana dan prasarana kantor Outcomes (Program) : Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	31 unit	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				67.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
6	Pendidikan dan Pelatihan non formal	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Pendidikan dan Pelatihan non formal	16 pegawai	48.000	Pendidikan dan Pelatihan non formal	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Pendidikan dan Pelatihan non formal	12 pegawai
			Outcomes (Program) :	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SKPD					Outcomes (Program) :	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SKPD	
7	Pengadaan Baju PDH PNS	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Pakaian PDH batik bagi PNS	66 pegawai	19.000	Pengadaan Baju PDH PNS	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Pakaian PDH batik bagi PNS	55 pegawai
			Outcomes (Program) :	Terpenuhinya penggunaan PDH batik oleh PNS					Outcomes (Program) :	Terpenuhinya penggunaan PDH batik oleh PNS	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				26.500	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				27	
8	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	6.000	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Rencana Kerja SKPD	1 dokumen
			Outcomes (Program) :	Tersedianya perencanaan tahunan SKPD					Outcomes (Program) :	Tersedianya perencanaan tahunan SKPD	
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Laporan keuangan SKPD	4 dokumen	7.500	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Laporan keuangan SKPD	4 dokumen
			Outcomes (Program) :	Terlaporkannya kinerja keuangan					Outcomes (Program) :	Terlaporkannya kinerja keuangan	
10	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD	19 dokumen	13.000	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD	19 dokumen
			Outcomes (Program) :	Terlaporkannya kinerja SKPD					Outcomes (Program) :	Terlaporkannya kinerja SKPD	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			100%	942.915	Program Penataan Administrasi Kependudukan			100%		
11	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Surat Pindah Datang Rekaman e-KTP penduduk	7000 unit 34000 unit 4800 unit 4000 unit	289.415	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Surat Pindah Datang Rekaman e-KTP penduduk	7000 unit 34000 unit 4800 unit 4000 unit
			Outcomes (Program) :	Teterbitkannya KTP, KK dan Surat keterangan pindah datang penduduk					Outcomes (Program) :	Teterbitkannya KTP, KK dan Surat keterangan pindah datang penduduk	
12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan	3 dokumen	73.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan	3 dokumen
			Outcomes (Program) :	Tersedianya dokumen monev dan pelaporan perkembangan penduduk					Outcomes (Program) :	Tersedianya dokumen monev dan pelaporan perkembangan penduduk	

13	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan e-KTP	13 unit	411.000	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan e-KTP	13 unit	
			Outcomes (Program) :	Terkelolanya sarana dan prasarana SIAK					Outcomes (Program) :	Terkelolanya sarana dan prasarana SIAK		
14	Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Berkas kependudukan dan permohonan catatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital	350 buku dan 1.164 dokumen	45.500	Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Berkas kependudukan dan permohonan catatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital	350 buku dan 1.164 dokumen	
			Outcomes (Program) :	Terkelolanya dokumen kependudukan dan catatan sipil					Outcomes (Program) :	Terkelolanya dokumen kependudukan dan catatan sipil		
15	Kegiatan Penyusunan Profil/Proyeksi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Profil kependudukan	1 dokumen	51.000	Kegiatan Penyusunan Profil/Proyeksi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Profil kependudukan	1 dokumen	
			Outcomes (Program) :	Tersedianya profil kependudukan					Outcomes (Program) :	Tersedianya profil kependudukan		
16	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil Publikasi pelayanan adminduk	600 orang 1 kali	73.000	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil Publikasi pelayanan adminduk	600 orang 1 kali	
			Outcomes (Program) :	Tersampainya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil serta publikasi pelayanan adminduk	Outcomes (Program) :				Tersampainya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil serta publikasi pelayanan adminduk			
17	Pengelolaan Data Base	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Data agregat kependudukan Portal data	25 buku 1 paket	23.000	Pengelolaan Data Base	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Data agregat kependudukan Portal data	25 buku 1 paket	
			Outcomes (Program) :	Tersusunnya data agregat kependudukan dan terselenggaranya portal data	Outcomes (Program) :				Tersusunnya data agregat kependudukan dan terselenggaranya portal data			
Program Administrasi Pencatatan Sipil					71,46%	248.000	Program Administrasi Pencatatan Sipil					71,46%
18	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Akta Kelahiran Akta Kematian	3000 dokumen 2000 dokumen	109.000	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Akta Kelahiran Akta Kematian	3000 dokumen 2000 dokumen	
			Outcomes (Program) :	Teterbitkannya pelayanan akta kelahiran dan akta kematian					Outcomes (Program) :	Teterbitkannya pelayanan akta kelahiran dan akta kematian		
19	Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil UPTD	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Akta Kelahiran Akta Kematian	1000 dokumen 1000 dokumen	35.000	Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil UPTD	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Akta Kelahiran Akta Kematian	1000 dokumen 1000 dokumen	
			Outcomes (Program) :	Teterbitkannya akta kelahiran dan akta kematian di UPTD	Outcomes (Program) :				Teterbitkannya akta kelahiran dan akta kematian di UPTD			
20	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Akta perkawinan Akta perceraian Akta pengakuan anak Akta pengesahan anak	147 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	104.000	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan	Kabupaten Kulon Progo	Output (Kegiatan) :	Akta perkawinan Akta perceraian Akta pengakuan anak Akta pengesahan anak	147 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	
			Outcomes (Program) :	Teterbitkannya pelayanan akta perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak	Outcomes (Program) :				Teterbitkannya pelayanan akta perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak			

	dan Pengesahan Anak		Outcomes (Program) :	Teterbitkannya akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak		Anak		Outcomes (Program) :	Teterbitkannya akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak		
				J U M L A H		3.927.915			J U M L A H		2

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik.

Tiga program strategis nasional tersebut merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan public, peningkatan keamanan Negara dan efektivitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintahan. Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/lokal sebagai persyaratan pelayanan publik. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsukan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan kriminal, teroris, TKI illegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan beberapa perubahan. Pada pasal 79A disebutkan bahwa "*Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya*". Sebagai implikasi dari amanat Undang-undang tersebut maka terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menghentikan pemungutan retribusi dari pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil. Sedangkan untuk denda keterlambatan atas permohonan surat/akta masih tetap dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 67 Tahun 2010 tentang Denda Keterlambatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan dana dari APBD Provinsi untuk dialokasikan dalam kegiatan implementasi SIAK (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) yakni dalam rangka menunjang kegiatan pemutakhiran data kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan SKPD

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil
- b) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
- c) Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir (real time)

3.2.2 Sasaran SKPD

- a) Terpenuhinya kepastian hukum dan hak-hak sipil penduduk
- b) Terwujudnya aparatur pelayanan yang professional dan kompeten
- c) Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai
- d) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kewajibannya dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
- e) Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir dan mudah diakses masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Yang menjadi pertimbangan pengajuan kegiatan dalam rencana kerja tahun 2017 ini adalah untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 yakni memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan dasar dan wajib pemerintah yang merupakan hak dasar setiap warga Negara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2017 meliputi 6 (enam) program dan 20 (dua puluh) kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

- c. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
 - b. Kegiatan Pengadaan Baju PDH PNS.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD;
 - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD;
 - c. Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating Dan Pemeliharaan);
 - b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kependudukan;
 - c. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK;
 - d. Kegiatan Penyusunan Profil/Proyeksi Kependudukan;
 - e. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil;
 - f. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - g. Kegiatan Pengelolaan Data Base
- 6. Program Administrasi Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kelahiran Dan Kematian;
 - b. Kegiatan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Catatan Sipil UPTD;
 - c. Kegiatan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Dan Pengesahan Anak;

Usulan program/kegiatan untuk tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dijelaskan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
JUMLAH PAGU : Rp. 2,681,953,400

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEGIATAN
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%					190,539,700		
1.10.1.10.01.01.01	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor	45 %	124,750,500	34,505,555	Sedang Berjalan
1.10.1.10.01.01.02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	Terpenuhinya penatausahaan keuangan dan barang	15 %	36,000,000	0	Sedang Berjalan
1.10.1.10.01.01.03	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi	40 %	29,789,200	0	Sedang Berjalan
1.10.1.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran				Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	100%					1,007,357,000		
1.10.1.10.01.02.01	Pengadaan sarana dan prasarana	Peningkatan	Meningkatnya Tata	Lingkup Kabupaten			Gordyn	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	45 %	470,148,000	0	Sedang Berjalan

	perkantoran	kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Kelola Pemerintahan	en										
							Komputer PC + monitor	2 unit						
							CCTV	1 paket						
							AC	4 unit						
							Printer dot matrik	6 unit						
							Kendaraan roda 4	1 unit						
							Server untuk backup data	1 unit						
							UPS Server	1 unit						
1.10.1.10.01.02.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			pemeliharaan kendaraan roda 4, pemeliharaan kendaraan roda 2, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/laptop, pemeliharaan printer, pemeliharaan mesin antrian, pemeliharaan mesin ketik, pemeliharaan mesin fax	14 unit	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	55 %	537,209,000	0	Sedang Berja	
1.10.1.10.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD	100%					6,000,000			
1.10.1.10.01.03.02	Pendidikan dan pelatihan non formal	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Pendidikan dan pelatihan non formal	6 orang	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur	100 %	6,000,000	0	Baru	
1.10.1.10.01.04	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja				Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	100%					47,500,000			

1.10.1.10.01.04.01	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD	2 dokumen	Adanya perencanaan tahunan SKPD	50 %	26,000,000	0	Sedang Berjalan
1.10.1.10.01.04.02	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Laporan keuangan SKPD	4 dokumen	Terlaporkannya kinerja keuangan	30 %	7,500,000	0	Sedang Berjalan
1.10.1.10.01.04.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD	19 dokumen	Terlaporkannya kinerja SKPD	20 %	14,000,000	0	Sedang Berjalan
1.10.1.10.01.05	Program Penataan Administrasi Kependudukan					100%					1,220,818,800		
1.10.1.10.01.05.02	Pengelolaan dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			scanning register	3000 record	Terkelolanya dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	28,000,000	0	Sedang Berjalan
							Berkas kependudukan dan catatan sipil	600 buku					
1.10.1.10.01.05.03	Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			komputer SIAK	6 unit	Jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak SIAK dalam kondisi baik	100 %	345,000,000	0	Sedang Berjalan
							hardware dan jaringan	2 paket					
							tower	2 unit					
							printer SIAK	6 unit					
1.10.1.10.01.05.05	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas	Meningkatnya Tata Kelola	Lingkup Kabupaten			Kartu Keluarga	34000 unit	Peningkatan administrasi kependudukan	100 %	656,818,800	0	Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.06.01	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			akta kematian	2000 dokumen	Terbitnya administrasi kependudukan	100 %	112,285,500	0	Baru
							akta kelahiran	3000 dokumen					
1.10.1.10.01.06.02	Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil UPTD	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			akta kematian	1000 dokumen	Terbitnya administrasi kependudukan	100 %	16,449,000	0	Baru
							akta kelahiran	1000 dokumen					
1.10.1.10.01.06.03	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			akta pengesahan anak	0 dokumen	Terbitnya administrasi kependudukan	14 %	81,003,400	0	Baru
							akta perceraian	1 dokumen					
							akta perkawinan	150 dokumen					
							akta pengakuan anak	0 dokumen					

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh SKPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan stakeholders berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rancangan Rencana Kerja ini dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada pendekatan baru dalam sistem penganggaran, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rencana anggaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini diharapkan dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya harapan kita semua, semoga dokumen rancangan Rencana Kerja SKPD ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan catatan sipil.

Kulon Progo, 09 Juni 2016

Kepala Dinas,

Drs. DJULISTYO

Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP 19620715 198903 1 005